

ABSTRAK

Regulasi terkait skala upah bagi pekerja di sektor UMK tidak dapat diterapkan karena rentan mempengaruhi keuangan usaha sehingga rentan mengalami kebangkrutan. Berkembangnya sektor usaha *coffee shop* tidak terlepas dari persoalan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dikarenakan terdapat banyak jumlah *coffee shop* di Kabupaten Kepulauan Yapen menjadikan para pencari kerja usia produktif memanfaatkannya untuk mendapatkan pekerjaan. Adanya lapangan pekerjaan tersebut dimanfaatkan oleh pencari kerja sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan, terlebih sektor usaha *coffee shop* merupakan sektor informal yang mana selalu dianggap sebagai katup pengaman atas masalah pengangguran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem mekanisme pengupahan pekerja pada sektor usaha *coffee shop* yang berbentuk UMK di Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum terhadap pekerja *coffee shop* di Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian analisis deskriptif, metode pengumpulan data observasi dan wawancara serta studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem mekanisme pengupahan pekerja telah sesuai dengan standar upah minimum akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan upah kerja lembur, ketentuan jam kerja, dan tidak memberikan hak cuti berdasarkan PP Pengupahan dan PP PKWT. Pelindungan hukum dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Yapen serta memberikan ketentuan terhadap sektor UMK yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) karyawan maka harus memberikan gaji dengan standar UMR serta BPJS Ketenagakerjaan yang harus disertakan.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Pekerja, Sektor Usaha *Coffee Shop*, Usaha Mikro dan Kecil, Kabupaten Kepulauan Yapen

ABSTRACT

Regulations related to wage scales for workers in the MSE sector cannot be applied because they are vulnerable to affecting business finances so that they are vulnerable to bankruptcy. The problems related to wages are in line with the results of observations made by the author. There is a phenomenon related to wages in coffee shop R for barista workers with working hours of 8 (eight) hours per day in the form of a gross wage per day of Rp 50,000.00 or a monthly wage of Rp 1,500,000.00 for part-time workers. Meanwhile, workers at coffee shop BG get a wage for part-time workers per day of Rp 56,000.00 and for per month Rp 1,700,000.00. Meanwhile, at Coffee Shop P, workers are paid a daily wage of Rp. 60,000.00 with a monthly wage of Rp. 1,800,000.00.

The purpose of this research is to analyze the wage mechanism system for workers in the coffee shop business sector in the form of MSEs in the Yapen Islands Regency based on laws and regulations as well as legal protection for coffee shop workers in the Yapen Islands Regency who do not receive wages in accordance with the provisions of laws and regulations. The method used in this research uses an empirical juridical approach, descriptive analysis research specifications, observation and interview data collection methods and literature studies.

The results of this study indicate that the worker wage mechanism system is in accordance with the minimum wage standard but does not comply with the provisions of overtime pay, working hour provisions, and does not provide leave rights based on the Wage PP and PKWT PP. Legal protection is carried out by conducting socialization from the Manpower and Transmigration Office of the Yapen Islands Regency and providing provisions for the MSE sector which has more than 10 (ten) employees, it must provide salaries with UMR standards and BPJS Ketenagakerjaan which must be included.

Keywords: Legal Protection, Workers, Coffee Shop Business Sector, Micro and Small Enterprises, Yapen Islands Regency